POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2013.

(STUDI PADA MASYARAKAT KELURAHAN SIRING AGUNG, KOTA PALEMBANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Sosial Pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

OLEH:

M. GERALDI PRIHANDANA

NIM : 07091002008

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2013

S
324.607
Ger
P
2013

26229/26790

POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2013.

(STUDI PADA MASYARAKAT KELURAHAN SIRING AGUNG, KOTA PALEMBANG)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Sosial Pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

OLEH:

M. GERALDI PRIHANDANA

NIM : 07091002008

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2013

LEMBAR PENGESAHAN

POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2013.
(Studi pada Masyarakat Kelurahan Siring Agung, Kota Palembang)

SKRIPSI

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk mengikuti ujian komprehensif dalam memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1 Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Pada Tanggal 08 Januari 2014

Diajukan Oleh:

M. GERALDI PRIHANDANA

07091002008

Pembimbing 1

Dr. Zulfikri Suleman, M A
NIP. 195907201985031002

Pembimbing 2

Dra. H. Eva Lidya, M.S.i
NIP. 195910241985032002

POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2013
(STUDI PADA MASYARAKAT KELURAHAN SIRING AGUNG, KOTA PALEMBANG)

SKRIPSI

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Pada tanggal 19 Februari 2013
Dan telah dinyatakan berhasil

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Dr. Zulfikri Suleman, MA
Ketua

Dra. H. Eva Lidya, M.Si
Anggota

Dra. Dyah Hapsari, ENH., M.Si
Anggota

Rudy Kurniawan, S.Th.I., M.Si
Anggota

Inderalaya, Maret 2014
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dekan,

Prof Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990033100 1

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- **"Tuhan menciptakan ketakutan semata-mata hanya untuk melihat mana hamba yang ingin berjuang lalu menjadi pemenang dan mana hamba yang selalu dihantui dengan kekhawatiran serta keraguraguan lalu tidak melakukan apapun. Dan saya memilih menjadi pemenang".**

(M. Geraldi Prihandana)

- **"Kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah berpegang pada tali yang kita punya. Dan tali itu adalah perilaku yang benar".**

(Charles R. Swindoll)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

1. **Negeri berjuta sumber daya (Indonesia)**
2. **Almarhum Ayahanda dan Ibunda tercinta**
3. **Saudara-saudariku tersayang**
4. **Teman-teman HMI & Waki Fisip Unsri**
5. **Belahan jiwaku nantinya**
6. **Sahabat dan rekan-rekan seperjuanganku Sosiologi 2009**
7. **Almamater yang selalu kubanggakan**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, Wr. Wb

Segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam karena atas limpahan kasih sayangNya, RidhoNya, dan petunjukNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi "Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota Palembang tahun 2013 (Studi pada Masyarakat Kelurahan Siring Agung, Kota Palembang)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna mencapai gelar sarjana Ilmu Sosial pada jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M.Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan Bapak Rudy Kurniawan S.th.I., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Mery Yanti, S.Sos., M.A, selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah, memberikan arahan, bimbingan, serta nasehatnya.

5. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA. selaku dosen pembimbing pertama skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si. selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan nasehat, arahan, dan bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen FISIP UNSRI khususnya jurusan Sosiologi
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan jajaran yang ada yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan di kampus Fisip Universitas Sriwijaya.
9. Kepada Almarhum Ayahanda tercinta yang telah banyak bekerja keras, selalu berdo'a bagi kesuksesan anak-anaknya, serta berjuang demi membesarkan saya dan mendidik dengan penuh rasa tanggung jawab hingga akhir hayatnya. Ibunda tercinta yang selalu tak bosan-bosannya memberikan nasehat kepada saya, berdo'a demi kesuksesan saya, dan selalu menjadi motivasi utama saya dalam berjuang menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada adik-adikku tercinta, M.Erlangga Setia Budi C.S.An., dan Diva Aulia Rahmi jadilah anak yang selalu berbakti sama Ibu dan jangan lupa selalu berdo'a bagi Bapak kita sebagaimana beliau selalu mendoakan kita selama hidupnya. Buatlah Bapak dan Ibu bangga melalui bakti dan bukti prestasimu.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2009 Sosiologi Arozak S.Sos, Abdul Yani Suryadi S.Sos, Dedy Irawan, Reni Kustyana S.Sos, Agus Burniat S.Sos, Kamardi Arief S.Sos, Bella Janesia S.Sos, Slamet Teguh Rahayu S.Sos, Widyawati, Hendra Octiana Sari S.Sos, Satrius Oksadam S.Sos, Wiwin Elza S.Sos, Nirta Sari S.Sos, Elda Sari S.Sos dan Panser Parubi, Easy, Mardoni, Tryas Tsubandi, Dani Meilassani, Ahmad Muhajir, Idil Fatra cepet nyusul ya! Serta teman-teman Sosiologi 2009 yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita sukses semua.
12. Ibu Lurah Siring Agung dan Bapak Ketua RT di Kelurahan Siring Agung yang telah memberikan izin serta membantu memberikan informasi dan bantuan data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi.
13. Sahabat-sahabat Waki Fisip Unsri, Suharwijoyo, Rizky Ardiyanto S.IP., M. Iqbal Themi S.IP., Rohim Pahrozi, S.Sos., Wandi, Nanda, Al-Muttaqien, Ali Sumarta, Juniussava, dan HMI Komisariat Sriwijaya Universitas Sriwijaya Agung Prihatna S.Sos, Haekal Haffafah, Agung Pratama S.Sos, Arif Mohendi S.Sos, Prima, Ramdoni, Agus, Repil Ansen, Zoelkarnain, Zulfikar, Solikha Yulia Rahman, Nikmah, Nur, Nyayu, Yessi, Defi, Santi. Terima kasih kebersamaannya selama ini. Saya akan selalu mengingat kalian semua.
14. Teman-teman kost ku tercinta baik yang masih menempati Blok B No.10 Komperta Indralaya maupun sudah meninggalkan kosan untuk selama-lamanya (Radif, Alfren, Ralpi, Noperson, Andi, Hendi, Sigit, Brawijaya, Fadil, Rangga, Amri, Khaidar, Danar, Hardi, Rendra, Dedy Irawan,

Erlangga, Sendy, Hairudin, Budi, Harry, Sadam, Taufik, Akbar Sayudi, M.Akbar, Fajar, Raju, Widi, Zidin, Arianto, Ricardo, Fitra). Terima kasih atas interaksinya sehingga dapat menambah wawasan dan kedewasaan penulis.

15. Para informan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena telah bersedia meluangkan waktu untuk partisipasinya dalam wawancara maupun memberikan izin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa syukur yang berlimpah bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Seiring dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan penulis sangat mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya. Akhir kata, penulis banyak mengucapkan terima kasih dan berharap skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Indralaya, Januari 2014

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota Palembang tahun 2013. (Studi pada Masyarakat Kelurahan Siring Agung Palembang). Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana politik uang di Kelurahan Siring Agung Palembang dan bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Siring Agung Palembang mengenai politik uang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik uang di Kelurahan Siring Agung Palembang dalam pemilihan kepala daerah Walikota Palembang tahun 2013 dan untuk mengetahui pandangan masyarakat Kelurahan Siring Agung Palembang mengenai politik uang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan unit analisis kelompok masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Siring Agung Palembang dan sudah memiliki hak pilih. Pemilihan informan dengan menggunakan purposive snowball dengan jumlah informan yang didapat berdasarkan pertimbangan peneliti yaitu 8 informan (6 informan kunci dan 2 informan pendukung). Pengumpulan data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa politik uang dilakukan oleh tim sukses kandidat Sarimuda dan tim sukses kandidat Romi Herton dalam beberapa bentuk yakni: Pembagian sembako yang dilakukan pada waktu kampanye (satu bulan sebelum pemilihan) dan pembagian sembako pada hari-H pemilukada berlangsung, serta pemberian uang. Pandangan masyarakat Kelurahan Siring Agung Palembang mengenai politik uang adalah masyarakat memandang politik uang sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam pemilihan umum yang dikarenakan umumnya masyarakat dinilai kurang peduli untuk melihat kualitas kandidat dan hanya memilih didasarkan pada siapa kandidat yang memberikan uang maupun sembako. Masyarakat juga memandang aparat hukum dinilai tidak serius menangani politik uang dan masyarakat menganggap politik uang adalah hal yang lumrah. Selain itu masyarakat memandang politik uang memiliki dampak negatif bagi masyarakat dan Negara serta tidak menjamin kemenangan kandidat.

Kata Kunci : Politik Uang, Pemilihan Kepala Daerah Walikota Palembang tahun 2013

ABSTRACT

The title of this study is The Money Politics in Palembang Major Election in 2013. (Study at the society of Siring Agung District, in Palembang). The problem of the study is How the Money Politics at Siring Agung District in Palembang, in Major Election 2013 are and How the view of society at Siring Agung District in Palembang toward Money Politics are. The aimes of this study are to find out How the Money Politics at Siring Agung District in Palembang, in Palembang Major Election 2013 and How the view of society at Siring Agung District in Palembang toward Money Politics. This study is a descriptive qualitative study and the unit of analysis of this study is society group of Siring Agung District in Palembang whose already had a suffrage. The selection of informants by using the snowball purposive method. There were 8 informants based on observer consideration (6 key informants and 2 support informants). The collection of data obtained from deep interviews, observations and documentations. The results of this study shows that the money politics activity conducted by successor team of Sarimuda candidate and successor team of Romi Herton candidate in many forms, as follows: Distribution of daily need that happened when campaign time (around one month before election), distribution of daily need when vote election on going, and distribution of cash money. The society also view that the money politics is a habit in election because our society had less attention to see the quality of candidate and they just vote for those who gave them money or daily needs. They also see the law instrument were not serious in solving the money politics, and society view that money politics is common. Beside that, society view that money politics had negative effect to the nation and people, and never guarantee the victory of candidates.

Keywords : Money Politics, Palembang Major Election 2013

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 141915
TANGGAL : 24 JUN 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR BAGAN..... viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 01

1.2. Rumusan Masalah 07

1.3. Tujuan dan Manfaat 07

1.3.1. Tujuan Penelitian.....07

1.4. Manfaat Penelitian.....07

1.4.1. Manfaat Teoritis.....07

1.4.2. Manfaat Praktis.....08

1.5. Tinjauan Pustaka 08

1.5.1. Penelitian yang Relevan 08

1.5.2 . Kerangka Pemikiran 12

1.6. Metode Penelitian 30

1.6.1 Metode Penelitian.....30

1.6.2. Batasan Konsep 30

1.6.3. Informan.....30

1.6.4. Peran Peneliti.....31

1.6.5. Lokasi Penelitian.....32

1.6.6. Unit Analisis.....32

1.6.7. Data dan Sumber Data.....33

1.6.8. Teknik Pengumpulan Data.....33

1.6.9. Teknik Analisa Data.....35

1.6.10. Triangulasi Data.....36

Bab II Kelurahan Siring Agung, Kota Palembang.....37

2.1. Luas dan Batas Kelurahan Siring Agung, Palembang.....37

2.2. Kondisi Geografis.....38

2.3. Komposisi Penduduk.....38

2.4. Tingkat Pendidikan.....39

2.5. Mata Pencaharian Penduduk.....41

2.6. Jumlah Penduduk menurut Agama.....41

2.7. Gambaran Singkat Kelurahan Siring Agung, Palembang.....42

2.8. Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota Palembang tahun 2013.....42

2.9 Deskripsi Informan Penelitian.....43

Bab III Analisis dan Interpretasi Data 46

3.1. Politik Uang di Kelurahan Siring Agung, Palembang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota Palembang Palembang.....46

3.1.1. Bentuk Politik Uang.....47

3.1.2. Waktu Politik Uang Terjadi.....65

3.2. Pandangan Masyarakat terhadap Politik Uang.....69

3.2.1. Politik Uang menjadi Sebuah Budaya dalam Pemilihan Umum.....69

3.2.2. Analisis Teori Budaya Politik.....86

Bab IV Kesimpulan dan Saran.....91

4.1 Kesimpulan 91

4.2 Saran 92

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Tabel Jumlah Penduduk Kelurahan Siring Agung, Palembang.....38

Tabel II.2. Tabel Penduduk Menurut Kelompok Usia 39

Tabel II.3. Tabel Jumlah Lembaga Pendidikan 39

Tabel II.4. Tabel Tingkat Pendidikan Penduduk.....40

Tabel II.5. Tabel Jenis Pekerjaan Penduduk.....41

Tabel II.6. Tabel Jumlah Penduduk Menurut Agama.....41

Tabel II.7. Tabel Kondisi Sosial Ekonomi Informan.....44

DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN

Gambar Ilustrasi Pemberian 1.1 68

Gambar Ilustrasi Pemberian 1.2 68

Bagan Kerangka Pemikiran I.1.....29

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.1. LATAR BELAKANG

Pemilukada atau pemilihan umum kepala daerah adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih (konstituen), dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Pasangan kandidat calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih akan dinyatakan sebagai kepala daerah yang akan memimpin suatu wilayah dalam beberapa jangka waktu tertentu ke depan.

Tahap pelaksanaan tentang pemilihan kepala daerah meliputi:

1. Penetapan daftar pemilih;
2. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah;
3. Kampanye, hingga masa tenang;
4. Pemungutan suara;
5. Penghitungan suara;
6. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Pemilukada di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu pada saat ini kita melaksanakan pemilu langsung dari presiden, DPR, gubernur, bupati/walikota, hingga kepala desa. Dengan memilih langsung kepala daerahnya diharapkan

individu-individu lokal maupun nasional dapat menemukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka.

Dalam pemilukada terdapat salah satu tahapan yang disebut "kampanye". Kampanye merupakan usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobby dan lain-lain. Kampanye adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu. Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut.

Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah, berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum resmi. Itulah pelaksanaan yang telah disepakati dalam "sopan-santun politik"[1]. Kegiatan kampanye dinilai sah apabila tidak bertentangan dengan peraturan pemilihan umum. Namun kampanye yang terjadi tidak selalu berjalan lurus dengan aspek-aspek demokrasi dan undang-undang yang berlaku. Peristiwa pelanggaran-pelanggaran pemilu kerapkali mewarnai panggung demokrasi Indonesia. Sebagai contoh pada pemilihan gubernur sumatera selatan tahun 2013 terdapat kecurangan yang dilakukan oleh kandidat calon gubernur *incumbent* berinisial AN, dimana AN terbukti menggunakan APBD Provinsi Sumatera Selatan untuk memenangkan pemilukada Sumatera Selatan termasuk

[1] Roem Topatimasang, *Menutup Pintu Masuk Politik Uang* (Jakarta: Maarif Institute, 2011) 92

kepentingan kampanye pada pemilukada Sumatera Selatan tahun 2013 secara sistematis, terstruktur dan massif[2].

Selain itu pada pemilukada walikota Kota Palembang tahun 2013 yang dilaksanakan pada bulan April 2013 juga ditemukan beberapa pelanggaran oleh panwaslu atau panitia pengawas pemilu Kota Palembang. Panwaslu Kota Palembang menemukan beberapa pelanggaran kampanye pemilukada. Seperti kegiatan kampanye yang dilakukan para kandidat calon Walikota Palembang tahun 2013 di luar zona yang telah disepakati, kampanye yang melibatkan anak-anak dan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab[3].

Namun dari beberapa pelanggaran-pelanggaran tersebut, kasus pelanggaran pada pemilukada Walikota Palembang tahun 2013 di dominasi oleh pengrusakan segel kotak suara dan politik uang. Panwaslu Kota Palembang mencatat telah menerima laporan-laporan resmi terkait pelaksanaan pemilukada Kota Palembang tahun 2013. Laporan-laporan tersebut meliputi pelanggaran-pelanggaran yang telah disebutkan sebelumnya. Dan selain itu, pelanggaran di dominasi oleh salah satunya politik uang atau *money politics* yang terjadi di Kelurahan Siring Agung, Palembang [4].

---

[2] Diakses pada tanggal 15 Juli 2013 pukul 19.00 WIB: http://news.liputan6.com/read/636755/alex-noerdin-pakai-apbd-untuk-kampanye-mk-sumsel-pilkada-ulang

[3] Diakses pada tanggal 15 Juli 2013 pukul 19.00 WIB: http://penaone.com/panwaslu-palembang-temukan-pelanggaran-kampanye-pilkada.html

[4] Diakses pada tanggal 02 September 2013 pukul 10.00 WIB: http://sumsel.tribunnews.com/2013/04/11/panwaslu-catat-16-pelanggaran-pilkada-palembang

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Cara pendistribusiannya pun bermacam-macam. Mulai dari memanfaatkan peran serta kader atau pengurus partai tertentu hingga melibatkan tokoh-tokoh setempat seperti oknum tokoh pemuda, aparat, dan lain-lain yang memberikan langsung "amunisi" uang maupun barang kepada calon pemilih (konstituen), hingga simpatisan yang berasal dari wilayah pemilihan umum setempat yang memberikan pemberian secara langsung.

Politik uang merupakan salah satu pelanggaran dalam kampanye pemilihan umum. Prosedural hukum pemilu yang mengatur tentang pelanggaran politik uang beserta sanksinya telah diatur dalam undang undang no. 3 tahun 1999 pasal 73 ayat 3, yang berbunyi :

> "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."

Adapun substansi dari produk hukum ini agar calon kandidat pemilu yang "bertarung" baik di pilpres, pemilu legislatif, pilgub, pilkada, hingga kepala desa dipilih berdasarkan kualitas, integritas, dan elektabilitas calon itu sendiri. Ketika politik uang mengalami keabsahan yang cukup kuat, maka fenomena kandidasi pilkada pun tidak perlu menghadirkan figur yang kuat, cerdas dan memiliki visi serta program kerja yang brilian. Hal itu disebabkan sederet perangkat itu tidak dibutuhkan oleh rakyat[5].

Namun faktanya, politik uang tetap saja terus terjadi. Sulitnya pelacakan dan pembuktian membuat para penegak hukum sulit untuk memberikan sanksi kepada pelaku politik uang. Joko Siswanto, mengatakan dugaan politik uang dalam pilkada di era otonomi daerah ini memang sulit untuk dilacak dan dibuktikan secara hukum karena sulitnya mendapatkan pengakuan dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi desah, hembusan dan getaran bahwa dalam pemilu, politik uang selalu mewarnai ranah pemilihan umum kepala daerah. Sehingga untuk menjadi kepala daerah membutuhkan setidaknya dana sepuluh miliar lebih[6].

Sulitnya pembuktian secara hukum dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, politik uang juga seolah-olah mendapat "sambutan hangat" di dalam masyarakat.

Terkait dengan politik uang, pada pemilihan Walikota Palembang tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2013, laporan resmi panwaslu Kota

---

[5] Irvan Mawardi, 2008 : Diakses pada tanggal 18 agustus 2013 pukul 10.00 WIB : http://kadermudabanten.blogspot.com/2009/12/pilkada-antara-money-politik-dan-ongkos.html

[6] Joko Siswanto, *Reaksi Intelektualitas untuk Demokratisasi* (Palembang : Yayasan Bakti Nusantara, 2006) 229

Palembang terkait temuan pelanggaran pemilukada Walikota Palembang tahun 2013, dugaan politik uang terjadi di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Sesuai dengan pernyataan ketua panitia pengawas pemilu (panwaslu) Kota Palembang, Ia mengatakan bahwasanya di Kelurahan Siring Agung Palembang pada pemilukada Walikota Palembang tahun 2013, terdapat dugaan pelanggaran pemilu yakni berupa politik uang di masyarakat[7].

Dari catatan yang dimiliki panitia pengawas pemilu (panwaslu) Kota Palembang pelanggaran banyak dilakukan oleh tim kampanye pasangan dengan nomor urut tiga (3), Sarimuda dan Nelly serta dilanjutkan oleh tim kampanye kandidat nomor urut dua (2) , Romi Herton dan Harnojoyo[8]. Selain itu secara kasat mata umumnya pelanggaran politik uang dalam pemilukada dilakukan oleh tim sukses dari calon kandidat dalam beberapa cara dan disertai dengan berbagai keterlibatan masyarakat. Meskipun politik uang jelas merupakan salah satu pelanggaran pemilu namun pada kenyataannya masyarakat seolah-olah menganggap politik uang sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pemilihan umum tidak terkecuali pemilihan umum kepala daerah. Inilah yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam proses penelitian ini.

---

[7] Diakses pada tanggal 2 September 2013 pukul 10.00 WIB : http://sumsel.tribunnews.com/2013/04/11/panwaslu-catat-16-pelanggaran-pilkada-palembang

[8] Diakses pada tanggal 2 September 2013 pukul 09.30 WIB : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/04/02/6/143328/Kampanye-Pemilu-Kada-Kota-Palembang-Sarat-Pelanggaran

1.2. Rumusan Masalah

Dari masalah yang diuraikan di latar belakang masalah penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana politik uang di Kelurahan Siring Agung, Kota Palembang pada pemilihan walikota Palembang tahun 2013?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Siring Agung, Kota Palembang terhadap politik uang pada pemilukada Kota Palembang tahun 2013?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan di dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui politik uang di Kelurahan Siring Agung, Kota Palembang pada pemilihan walikota Palembang Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kelurahan Siring Agung, Kota Palembang terhadap politik uang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi tambahan informasi dan perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya Sosiologi Politik dan Sistem Sosial

Budaya Indonesia terutama yang berkaitan dengan politik uang di dalam pemilihan kepala daerah

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan rujukan bagi studi lanjutan dalam mengungkap berbagai aspek yang berkaitan dengan fenomena politik uang didalam pemilihan kepala daerah.

2. Sebagai bahan rekomendasi bagi lembaga-lembaga pelaksana dan pengawas pemilihan kepala daerah.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian yang relevan

Sebenarnya penelitian mengenai politik uang di dalam pemilihan umum sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dari berbagai sudut pandang. Salah satu diantaranya penelitian yang dilakukan Ali Sahab (2012) yang berjudul *Vote buying dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). (Studi kasus pilkada Surabaya dan pilkada Kabupaten Blitar tahun 2010).* Penelitian ini bertujuan menjelaskan fenomena *money politics* di Kota Surabaya dan Kabupaten Blitar dalam pemilihan kepala daerah Walikota Surabaya dan Bupati Blitar tahun 2010 serta faktor penyebab terjadinya politik uang di masing-masing daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif, dimana peneliti menggambarkan kondisi "money politics" di kedua daerah pemilihan umum kepala daerah. Namun penelitian ini tidak spesifik memunculkan perbedaan politik uang di kedua daerah pemilihan umum kepala daerah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat politik uang di kedua daerah tinggi. Penyebab maraknya *politik uang* masyarakat Indonesia memang sebagian besar masih mendasarkan pilihannya pada rasionalitas ekonomi. Memilih kandidat yang memberikan keuntungan pada individu maupun kelompok secara langsung tanpa melihat *track record* atau program yang ditawarkan. Hal ini dilatarbelakangi kondisi status sosial ekonomi yang mayoritas sebagai petani penggarap dan beriringan dengan kekecewaan masyarakat terhadap sikap kandidat yang cenderung tidak memperhatikan konstituennya ketika sudah menjabat membuat masyarakat memilih berdasarkan pada rasionalitas ekonomi. Pemilih mendasarkan pilihannya pada apa yang diperolehnya. Akhirnya masyarakat akan berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kandidat secara langsung (*maximazing benefit minimazing cost*)[9]. (http://alisahab09-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-41933: 06-07-13).

Penelitian lain yang dilakukan Anis Chabibah (2009) yang berjudul *Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Ngampel Kecamatan Papar Kabupeten Kediri*. Penelitian ini menjelaskan bentuk-bentuk atau pola politik uang yang terjadi di masyarakat Desa Ngampel pada pelaksanaan pilkades beserta latar belakang yang melandasi politik uang, menjelaskan dampak dari politik uang yang terjadi di masyarakat Desa Ngampel Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, dan menjelaskan aspirasi masyarakat dalam upaya mencegah atau menanggulangi politik uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

[9] Anthony Down, dalam Ali Sahab : 2012.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk atau pola politik uang adalah pemberian uang tunai secara langsung, pemberian hadiah, makan gratis pada saat pilkades, pemberian rokok, makanan dan minuman, latar belakang yang melandasi politik uang adalah pembagian uang pada saat pilkades sudah menjadi tradisi, jika tidak ada uang, warga Ngampel cenderung tidak memilih. Kemudian dampak politik uang yang terjadi di Masyarakat Desa Ngampel adalah timbulnya berbagai aksi *vandal* seperti mencorat-coret jalan dengan cat, serta merusak gambar-gambar calon. Upaya mencegah politik uang pada masyarakat Desa Ngampel mengadakan sosialisasi anti politik uang, Mengadakan sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat, penyadaran dan pembelajaran politik. Kemudian penyebab yang melatarbelakangi terjadinya politik uang di Desa Ngampel adalah dikarenakan partisipasi calon pemilih yang rendah. Namun peneliti tidak berupaya untuk mencari data mengapa tradisi "malas memilih" tersebut terjadi sehingga penelitian cenderung kurang mendalam. (http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/2452: 06-07-13)

Penelitian berikutnya adalah *Politik uang dalam pemilukades Desa Cangkring dan Desa Dawuahan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal 2012 oleh Fuji Hastuti dari Universitas Diponegoro.* Penelitian ini melihat bagaimana politik uang dapat terjadi di masyarakat dua desa tersebut, pengaruh politik uang terhadap partisipasi pemilih, dan bagaimana bentuk serta waktu terjadinya politik uang di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian adalah adanya faktor kemiskinan, mentalitas, dan kultur melihat politik sebagai sarana untuk hal-hal yang bersifat materialistik. Politik uang di Desa Cangkring menjadi salah satu pertimbangan konstituen dalam memilih kandidat calon kepala desa, sedangkan di Desa Dawuahan politik uang tidak memiliki pengaruh yang spesifik terhadap pertimbangan konstituen dalam memilih karena semua kandidat kepala desa melakukan politik uang kepada konstituen. Pola politik uang terjadi dalam beberapa bentuk yakni pembagian kaos maupun barang pada masa kampanye dan pemberian uang maupun barang (serangan fajar) pada subuh dan malam hari satu hari sebelum pemilu (http://portalgaruda.org/download_article.php?article=72885&val=4924: 11-01-14).

Penelitian selanjutnya yaitu mengenai *Money politics dalam demokrasi: Suatu kajian teoritis penyelenggaraan pemilu legislatif 2009 oleh Putu Adi Sanjaya (2010).* Penelitian ini melihat fenomena politik uang dari segi tinjauan teoritis, sehingga peneliti tidak menjelaskan bagaimana politik uang pada pemilu legislatif 2009. Dari segi teori konflik, politik uang dilihat dari segi pendekatan kebutuhan manusia dan pendekatan hubungan masyarakat. Dari segi teori struktural fungsional, politik uang dilihat sebagai fenomena yang sudah terintegrasi di dalam masyarakat Indonesia. Dimana politik uang terjadi karena adanya kontribusi dari semua subsistem yang terpola di dalam masyarakat agar dapat bertahan (http://adisanjaya24.blogspot.com/2010/06/money-politic-dalam-demokrasi-suatu.html 06-07-13).

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa politik uang terjadi di hampir seluruh bentuk pemilihan umum baik legislatif, kepala daerah, hingga kepala desa. Kemudian politik uang dapat dipandang menguntungkan, dimana dapat meraih perolehan suara terhadap kandidat dan mampu memberikan keuntungan secara material kepada masyarakat, juga dapat dipandang negatif karena memiliki dampak-dampak yang cenderung tidak memberikan pendidikan politik konstituen (pemilih). Bila dibandingkan penelitian di atas, maka penelitian yang akan dilakukan ini lebih berfokus kepada mengenai politik uang di Kelurahan Siring Agung, Kota Palembang dalam pemilihan kepala daerah walikota Palembang tahun 2013 serta bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Siring Agung Kota Palembang terhadap politik uang pada pemilihan kepala daerah walikota Palembang tahun 2013.

1.5.2. Kerangka Pemikiran

Dalam studi ilmu sosiologi sebuah realitas sosial berupa sikap, perilaku, tindakan, pandangan yang berasal dari individu masyarakat di dalam lingkungan sosialnya disebut fakta sosial. Menurut Durkheim sebuah fakta sosial menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi. Sebuah fakta sosial harus disusun dan dipelajari melalui penelitian di dunia nyata sebagaimana orang mencari barang sesuatu atau yang lainnya[10]. Secara garis besar fakta sosial menurut Durkheim terdiri atas dua tipe yakni struktur sosial dan pranata sosial. Dari hubungan dua tipe fakta sosial inilah yang memunculkan kesinambungan dari sebuah sistem

[10] Dalam Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007. Hal 15

sosial yang tercermin di dalam sikap, perilaku, nilai-nilai atau pandangan individu di dalam sebuah kesatuan masyarakat tertentu.

Durkheim juga membedakan fakta sosial ke dalam dua macam yakni :

1) Dalam bentuk material. Yaitu sesuatu yang dapat disimak, diamati dan diobservasi. Contohnya sikap atau tindakan individu dan norma.
2) Dalam bentuk non material. Yaitu sesuatu yang dianggap nyata, yang hanya dapat muncul dari kesadaran manusia. Contohnya egoisme, opini atau pandangan.

Sikap dan tindakan individu masyarakat yang berlangsung di dalam sebuah struktur sosial merupakan sesuatu yang nyata karena dapat diamati, ditangkap, dan diobservasi. Dari sikap atau tindakan individu masyarakat tersebut tentu saja memiliki alasan-alasan tertentu yang muncul dari kesadaran manusia berupa egoisme dan opini atau pandangan. Fakta sosial ini bersifat *inter subjective* yang dianggap nyata.

Di dalam pemilihan atau pergantian tampuk kepemimpinan dalam hal ini pemilukada yang berlangsung di sebuah struktur sosial selalu disertai respon berupa sikap, perilaku, dan pola tindakan masyarakat dari berbagai elemen menurut fungsi dan perannya masing-masing di dalam sistem politik di sebuah negara. Peristiwa-peristiwa yang mengiringi realitas pemilukada tersebut dapat menjadi sebuah pola yang selalu berubah-ubah namun tetap dapat diidentifikasi keberadaannya. Begitu juga polarisasi yang seringkali muncul di dalam pemilukada sehingga menjadi sebuah kebiasaan di dalam masyarakat.

Kebiasaan merupakan salah satu unsur kompleks dari sebuah kebudayaan[11]. Simmel berpandangan orang-orang dalam interaksinya sehari-hari menghasilkan kebudayaan, namun lama kelamaan justru dunia sosial yang mulai mendominasi sang aktor yang menciptakan dan menciptakannya ulang secara terus menerus[12]. Bentuk kebudayaan tersebut ia sebut dengan kebudayaan objektif. Dimana ciri-ciri tentang hubungan antar manusia mengalami kemerosotan, dan relasi sosial cenderung di dominasi oleh sikap acuh dan mengabaikan.

Di dalam sebuah pemilihan umum kepala daerah, hal-hal atau peristiwa yang menyertai seperti pelanggaran-pelanggaran cenderung diabaikan oleh masyarakat akar rumput (*grassroot society*). Tanpa terkecuali dalam hal ini politik uang. Dan pada akhirnya lama kelamaan menjadi sebuah kebiasaan yang sulit untuk dihindari. Ketika nilai, moral, dan norma pelanggaran pemilu dinilai kurang mampu mengontrol tindakan politik masyarakat artinya ada suatu budaya obyektif mengenai politik uang yang cenderung dibiarkan sehingga secara terus menerus tercipta di lingkungan sosial politik masyarakat. Di sisi lain menurut Simmel, ketika ekonomi uang berkuasa dan uang membuat meruyaknya penggunaan uang pada penekanan kalkulabilitas dan rasionalitas di masyarakat pada seluruh ranah kehidupan.

Salah satu pusat perhatian Simmel adalah membahas mengenai uang, sebagai keterkaitan spesifik mengenai berbagai komponen kehidupan lain seperti pertukaran, kebebasan individu, kebudayaan, dan lain sebagainya. Simmel juga menghubungkan antara uang dan nilai. Secara umum ia berpendapat bahwa orang

[11] Tylor (1871) dalam Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. hal 151
[12] Simmel, dalam Ritzer, *Teori Sosiologi*, Kreasi Wacana, Bantul. 2008. Hal 186

menciptakan nilai dengan sebuah objek. Semakin sulit objek tersebut untuk diperoleh maka semakin bernilai objek tersebut. Faktor-faktor pemisah antara orang dengan objek tersebut diantaranya kelangkaan, kesulitan, keharusan untuk memberikan benda lain demi mendapatkannya, dan faktor lainnya. Uang berperan dalam mengatasi jarak antara orang dengan objek tersebut. Artinya uang dalam kehidupan modern memiliki peran penting bagi orang untuk memperoleh objek bernilai tersebut. Bagi beberapa individu masyarakat (dalam hal ini masyarakat kota modern metropolitan) yang dicirikan dengan intelektualitas yang dangkal[13], penerimaan terhadap pemberian uang maupun barang lainnya pada masa pemilu dari seseorang yang menginginkan jabatan tertentu menurut pandangan teori ini dapat dikatakan sebagai akibat dari kalkulabilitas yang dibutuhkan oleh ekonomi uang. Dalam kenyataannya tidak selalu demikian, sebuah relasi sosial dapat terjalin dengan sebagaimana mestinya meskipun terdapat perbedaan individu masyarakat dalam merespon stimulus pemberian uang atau barang berharga pada masa pemilu tersebut. Bagi sebagian individu masyarakat yang tidak menerima pemberian uang atau barang lainnya bukan berarti memiliki intelektualitas yang dangkal juga dan tidak menjunjung kalkulabilitas dan rasionalitas, tetapi lebih dari itu meskipun sebenarnya belum tentu menerima fenomena tersebut tetapi perilaku yang ditampilkan cenderung bersikap mengacuhkan atau membiarkan. Pada suatu kondisi inilah apa yang disebut simmel dengan kemerosotan peran individu di dalam kehidupan modern akibat dominasi kekuasaan ekonomi uang[14]. Uang pun

[13] Simmel, dalam Ritzer, *Teori Sosiologi edisi terbaru*, Kreasi Wacana, Ba ıtul. 2008. Hal 187
[14] Simmel, dalam Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana Prenada Med a Group, Jakarta, 2004. Hal 45

kini menjadi kekuatan penggerak politik[15]. Ia adalah resiko demokrasi liberal, sebuah demokrasi yang bertumpu pada "kebebasan", individual, dan intensitas aktualisasi diri secara berlebihan. Tidak disadari, kebebasan itu membuka ruang yang begitu besar masuknya "kekuatan uang" sebagai mesin sosial yang menggerakkan politik dan demokrasi. Sehingga tidak mengherankan apabila uang juga dapat dimanfaatkan sebagai tujuan-tujuan tertentu. Tanpa terkecuali sebagai instrumen politik[16]. Dalam usaha memenangkan suatu jabatan tertentu uang memiliki fungsi diantaranya sebagai alat untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan politik.

Dalam kepustakaan ilmu politik, pandangan-pandangan politik, sikap politik, maupun tindakan politik semuanya disebut "budaya politik". Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang memiliki ciri khas tersendiri. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, perilaku aparat negara, serta tanggapan masyarakat terhadap dinamika politik yang terjadi. Maka budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan pribadi dan sosial individu secara luas. Banyak batasan telah diberikan mengenai budaya politik. Diantaranya Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu[17].

Batasan di atas mengandung pengertian yang luas tentang budaya politik, sebab, Almond dan Verba tidak hanya menguraikan bagaimana sikap orientasi

---

[15] Nurus Shalihin, *Rasionalisasi Agama dalam Arena Politik*, (Lubuk Lintah: Imam Bonjol Press, 2013) Hal 75

[16] Damsar, *Sosiologi Uang*, (Padang: Andalas University Press, 2006) Hal Bab v-67

[17] Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Pollitik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) Hal 13.

masyarakat dan tujuan politik masyarakat terhadap sistem politik, akan tetapi juga sikap masyarakat terhadap peranan sesama warga negara terhadap sistem politik yang ada. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr. berpendapat bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologi dari sistem politik, yang mana budaya politik bersumber dari perilaku lahiriah dari manusia yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat[18]. Konsep budaya politik terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai, ketrampilan yang sedang berlaku di masyarakat termasuk kebiasaan yang ada pada sistem politik yang ada di suatu Negara. Termasuk kebiasaan yang mencakup cara-cara tertentu yang biasa dipakai untuk kepentingan politis.

Meskipun adanya definisi-definisi dengan penekanan yang bermacam-macam ini, namun dapat dikatakan bahwa budaya politik menyangkut hal yang sama, yaitu berisikan seperangkat sikap, perilaku, keyakinan dari individu maupun kelompok masyarakat, juga kecenderungan masyarakat tertentu dalam memandang dan menentukan orientasi serta tujuan masyarakat terhadap sistem politik yang ada.

Menurut Almond dan Verba budaya politik dibagi menjadi dua, budaya politik dengan kecenderungan militansi dan toleransi. Sistem ekonomi dengan teknologi yang kompeks menuntut kerjasama yang luas untuk memperpadukan modal dan ketrampilan. Jiwa kerjasama dapat diukur dari sikap orang terhadap

[18] A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007) 267

orang lain. Lebih banyak sikap militansi ataukah toleransi. Ciri-ciri kecenderungan militansi adalah perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif terbaik, tetapi dianggap sebagai usaha jahat dan menentang. Sedangkan ciri-ciri kecenderungan toleransi, adalah pemikiran yang berpusat pada masalah yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar. Bersikap netral atau krisis terhadap semua mengenai ide orang, bukan mencurigai. Budaya politik dengan kecenderungan toleransi memiliki kemiripan dengan pemikiran Simmel mengenai budaya objektif, dimana terjadi kemerosotan peran-peran individu sehingga kecenderungan yang terjadi adalah adanya sikap pengabaian dan pengacuhan diantara individu di dalam sebuah budaya kehidupan modern. Karena adanya dominasi kekuasaan ekonomi uang. Dalam hal ini yang berkaitan dengan sikap, perilaku, dan tindakan individu masyarakat dari masing-masing peran dan fungsinya terhadap fenomena politik tertentu di sebuah lingkungan sosial masyarakat.

Almond dan Verba mengatakan bahwa budaya politik dianggap sebagai hal yang berhubungan dengan lingkungan perasaan dan sikap dalam kesinambungan kehidupan politik sebagai salah satu sub kebudayaan masyarakat, dimana di dalamnya terdapat kebiasaan, motif, sikap, sejarah, norma moral, pandangan, emosi, pengetahuan, dan ketrampilan yang sedang berlaku di dalam kehidupan sosial politik.

Budaya politik yang berkembang di setiap negara sangat beragam, hal ini di pengaruhi oleh karakter budaya politiknya masing-masing. Untuk mengetahui

karakter budaya politik suatu bangsa dapat diukur melaui beberapa dimensi yang berkembang dalam masyarakat, yaitu :

- Tingkat pengetahuan umum yang dimiliki oleh masyarakat mengenai sistem politik negaranya, seperti pengetahuan tentang sejarah, letak geografis, dan konstitusi negaranya
- Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat suatu kebijakan
- Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari masyarakat dan media massa kepada pemerintah
- Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik dan bernegara, serta pemahamannya akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara.

Perbedaan dimensi tersebut menurut Almond dan Verba melahirkan beberapa tipe budaya politik yang berkembang dalam negara, yaitu :

1) Budaya politik parokial (parochial political culture), dimana pada tingkat tersebut frekuensi orientasi masyarakat terhadap empat dimensi tersebut diatas sangat rendah. Tidak ada peran-peran politik masyarakat yang bersifat khusus, sehingga peranan politik, baik yang bersifat politis, ekonomis, maupun religius sepenuhnya diserahkan kepada pengambil kebijakan/pemimpin yang biasanya dipegang oleh seorang kepada suku/adat, tokoh agama, ataupun tokoh masyarakat yang peranannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Budaya politik seperti ini banyak ditemukan pada bentuk masyarakat yang masih sederhana.

2) Budaya politik subjek/kaula (subject political culture), dimana pada tingkat tersebut frekuensi orientasi masyarakat terhadap dimensi pengetahuan dan pemahaman cukup tinggi, tetapi masih bersifat pasif, artinya masyarakat sudah memiliki pengetahuan, pemahaman, namun mereka belum memiliki orientasi dimensi pemahaman mengenai penguatan kebijakan dan partisipasi dalam kegiatan politik, mereka tidak memiliki keinginan dan kemauan untuk mencoba menilai, menelaah, atau mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mereka menerima apa adanya, sehingga sikap masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah terbagi menjadi dua kelompok, ada yang menerima atau menolak.
3) Budaya Politik Partisipan (participan political culture), dimana pada tingkat tersebut frekuensi orientasi masyarakat terhadap empat dimensi tersebut diatas lebih baik, masyarakat mulai bersifat aktif dalam peran-peran politik, meskipun perasaan dan evaluasi masyarakat terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak[19].

Budaya politik Indonesia bersifat parochial dan subjek di satu pihak namun di pihak lain memiliki budaya politik partisipan. Di satu pihak massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti primordial, isolasi dari kebudayaan luar, dan lain sebagainya, sedangkan di pihak lain kaum elitnya dan sekelompok massa yang lain sungguh-sungguh merupakan partisipan yang aktif yang kira-kira disebabkan oleh pendidikan. Jadi jelas terlihat bahwa kebudayaan

[19] Almond dan Verba, dalam A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007) 270

politik Indonesia merupakan *mixed political culture*. Yang diwarnai oleh besarnya pengaruh kebudayaan politik parochial dan kebudayaan politik subjek[20].

Sebagai salah satu fakta sosial yang ada di masyarakat, budaya politik perlu dibahas bersamaan dengan struktur sosial, yang lebih spesifik dalam hal ini dikategorikan sebagai struktur sosial politik meliputi cara-cara, pola tindakan, yang dilakukan masing-masing individu masyarakat dan orientasinya di dalam kehidupan politik dan pranata sosial yang diistilahkan ke dalam budaya politik sebagai kapabilitas sistem, yang meliputi peraturan-peraturan politik tertentu agar bertujuan untuk memastikan sejauh mana sistem politik yang berlaku di suatu Negara berjalan sebagaimana mestinya.

Seperti kita ketahui, sebagian negara-negara berkembang seperti di Indonesia, sudah mempunyai sistem politik yang diinginkan. Bagi masyarakat Indonesia, sistem politik ideal yang ingin dibangun ialah Demokrasi Pancasila[21]. Yang setelah melalui berbagai pergantian sistem dan rezim politik pada akhirnya diwujudkan dalam sebuah sistem yakni pemilihan umum secara langsung, adil, jujur, dan rahasia. Dimana masyarakat diberikan kebebasan dalam menentukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi masyarakat itu sendiri. Baik itu pemimpin Negara atau presiden, gubernur untuk wilayah provinsi, bupati untuk wilayah kabupaten, dan walikota untuk wilayah kota. Saat ini pemilihan umum kepala daerah di Indonesia dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Sesuai Undang-undang No 32 tahun 2004

---

[20] A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007) 271

[21] Alfian, *Demokrasi dan Pemilihan Umum,* Dalam LP3ES *Demokrasi dan Pemilihan Umum: Mencari Penyambung Lidah Rakyat* (Jakarta: Prisma,1977) 4

tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pasal 56 mengatakan bahwa:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik

Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

- Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
- Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
- Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Namun sebelum itu UU No.22 tahun 1999 telah terlebih dahulu mengatur mengenai pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh perwakilan rakyat (DPR) yang tertuang di pasal 40 ayat 1 yang berbunyi: "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil" (oleh dewan perwakilan rakyat/DPRD setempat).

Artinya ada perubahan dari sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, dimana sebelumnya wewenang pemilihan kepala daerah dilimpahkan kepada DPR menjadi wewenang rakyat di wilayah administratif bersangkutan.

Seperti kita ketahui perubahan tersebut dimulai dengan peristiwa reformasi yang dicirikan dengan jatuhnya rezim orde baru yang dipimpin oleh Presiden

Soeharto beserta para kroninya. Namun apa yang dipersoalkan bukanlah data bahwa banyak rezim-rezim otoriter telah bertumbangan selama beberapa dasarwarsa terakhir, tetapi semua jenis penyimpangan dari cita-cita demokrasi yang datang menggantikannya[22]. Isu-isu diluar konteks demokrasi yang sering muncul ke permukaan seperti politik uang, intimidasi, serta pemanfaatan birokrasi oleh para elit kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan menunjukkan bahwa sistem pemilihan umum Indonesia belum "bebas". Bebas dalam arti tanpa *intervensi* dari pihak manapun termasuk *intervensi* uang sebagai alat politik untuk membeli suara rakyat.

Salah satu alasan dirubahnya sistem pemilihan kepala daerah dari sistem perwakilan menjadi sistem pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat adalah mengurangi potensi politik uang di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik kabupaten/kota dan provinsi, karena jumlah pemilih (masyarakat yang berada di wilayah administratif tertentu) berjumlah lebih banyak[23]. Namun kendati demikian kita tidak dapat memastikan dengan dirubahnya sistem pemilihan umum secara langsung dapat menjamin mengurangi potensi politik uang. Meskipun bukan sebagai sentral perhatian utama penelitian ini, aspek ekonomi dan sosial dapat dijadikan tolok ukur. Kemampuan ekonomi para elit politik bisa saja memengaruhi pemilih yang dalam jumlah besar tersebut. Baik secara tidak langsung seperti sosialisasi program dan kampanye melalui bidang reklame, maupun secara langsung seperti kampanye secara tatap muka dan pemberian uang, sembako, atau barang-barang bernilai lainnya yang diberikan kepada

[22] Carothers, dalam Vedi R. Hadiz: 2013
[23] Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai suatu Alternatif* (Jakarta: Grafindo, 2005) 53.

masyarakat dengan tujuan meraih simpati calon pemilih. Modal sosial dapat dilihat melalui jaringan sosial, bagaimana mereka melalui kelompoknya memetakan dan membuat strategi pemenangan atau setidaknya mampu meningkatkan elektabilitas mereka, serta dapat memanfaatkan orang-orang tersebut agar mampu meningkatkan suara secara langsung misalnya tergabung di dalam tim sukses.

Dari fenomena politik yang timbul di atas dapat dipastikan individu akan mengambil keputusan dalam menyikapi serta mengambil tindakan yang dirasa sesuai dengan pandangan mereka terhadap aturan-aturan dan norma politik di dalam sistem politik yang ada.

Jadi budaya politik menunjuk pada hasil budaya politik seperti pola pikir, pandangan, tindakan, nilai, keyakinan, pengalaman politik individu terhadap sistem politik yang ada, dimana hasil-hasil budaya tersebut terbentuk berdasarkan proses aktivitas bangsa baik secara ekonomi, sosial dan politik. Karena budaya politik merupakan nilai-nilai dasar, maka ia merupakan kacamata seseorang individu maupun kelompok melihat dan memberi makna atau pandangan kepada fenomena politik disekitarnya, yang kemudian tercermin dalam sikap dan tindakan politik seseorang maupun kelompok tersebut berada.

Dalam fenomena pemilihan umum (pemilu) tak terkecuali pemilihan kepala daerah, tak dapat dipungkiri masih seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh massa pemilih maupun elit politik seperti kampanye yang dilakukan sebelum waktunya, kampanye yang melibatkan pihak birokrat, penggelembungan suara, dan sebagainya. Pelanggaran-pelanggaran yang

melibatkan massa pemilih seperti aksi *vandal* (pengrusakan fasilitas kampanye), pengrusakan segel surat suara sehingga surat suara menjadi tidak sah, hingga *money politics* atau politik uang.

Secara konteks demokrasi, proses demokrasi akan berjalan dengan baik apabila di dasarkan pada kemandirian dan rasionalitas rakyat dalam memilih pemimpin. Kemandirian dalam arti berupa posisi rakyat dalam menentukan pilihan secara bebas, yakni bebas dari intimidasi, tak terkecuali termasuk intimidasi uang. Rasionalitas tersebut bisa berupa pertimbangan *track record* atau telusur rekam jejak calon pemimpin yang akan maju dalam pemilihan umum kepala daerah dan sebagainya.

Banyak asumsi para ahli mengenai politik uang. Diantaranya pakar tata negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi politik uang diartikan sebagai proses untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.

Batasan di atas mengandung pengertian yang luas tentang politik uang dalam hal mempengaruhi massa, dikarenakan pengaruh yang terdapat pada politik uang umumnya agar massa pemilu memilih pasangan kandidat atau calon yang memberikan imbalan materi dengan harapan massa pemilu memberikan suara atau dukungan kepada mereka. Irvan Mawardi menjelaskan bahwa politik uang merupakan bagian dari upaya merebut kekuasaan lewat jalur politik dengan mengandalkan kekuatan uang atau materi[24]. Secara bahasa terdapat dua dimensi dari penjelasan sarjana ini, yakni politik dan uang. Politik adalah salah satu

[24] Mawardi, 2008 (diakses pada tanggal 18 agustus 2013 pukul 11.30 WIB : http://kadermudabanten.blogspot.com/2009/12/pilkada-antara-money-politik-dan-ongkos.html)

perjuangan memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan[25] dan uang yang di identikkan dengan salah satu kekuatan berbasis materi.

Politik uang pada pemilihan kepala daerah secara umum dibedakan menjadi empat bentuk sebagai berikut:

1. Bentuk 1 adalah transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan calon kepala daerah yang akan menjadi pengambil kebijakan/ keputusan politik pasca pilkada;
2. Bentuk 2 adalah transaksi antara pasangan calon kepala daerah dengan partai politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan;
3. Bentuk 3 adalah transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas pilkada yang mempunyai wewenang untuk menghitung perolehan suara; dan
4. Bentuk 4 adalah transaksi antara calon dan tim kampanye dengan massa pemilih (pembelian suara)[26].

Politik uang bentuk keempat adalah politik uang yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Interaksi politik uang adalah antara tim sukses kandidat atau kandidat itu sendiri dengan masyarakat sebagai calon pemilih. Masyarakat diberikan sesuatu yang bernilai materi dengan tujuan agar masyarakat

---

[25] F Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Bina Cipta, 1995) 42

[26] Eko Sutoro, *Modal Sosial, Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*. 2003 (Diakses pada hari minggu, 17 maret 2013 pukul 09.00 WIB : http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2342 410-politik-uang/#ixzz2GscBPFZm.

bersimpati dan mau memberikan dukungan kepada kandidat dalam bentuk pemberian suara.

Politik uang umumnya berbentuk pemberian uang maupun barang. Yang biasa terjadi ketika masa kampanye hingga pada hari-H pemilukada itu dilangsungkan (serangan dhuha)[27]. Cara pendistribusiannya pun bermacam-macam, diantaranya melalui kandidat itu sendiri hingga melalui perantara orang-orang tertentu seperti masyarakat yang tergabung di dalam tim relawan atau tim sukses[28]. Dari sini dapat diartikan menurut segi metode penyampaiannya politik uang bisa dikategorikan menjadi beberapa macam ; a. Kandidat memberi uang atau barang berharga secara langsung kepada konstituen; b. Kandidat memberikan uang atau barang berharga melalui tim sukses kepada konstituen.

Dari berbagai asumsi ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya politik uang adalah upaya meraih kekuasaan atau jabatan dengan mengandalkan kekuatan uang atau barang bernilai materi lainnya, dimana politisi memobilisasi suara massa pemilih atau konstituen dengan memberikan uang atau barang berharga lainnya pada waktu sebelum hingga pada pelaksaan pemilihan umum dilangsungkan.

Politik uang di Indonesia hampir dipastikan selalu ada di setiap pemilu, tak terkecuali pada pemilihan kepala daerah. Terlebih di era reformasi saat ini dimana rakyat diberikan ruang seluas-luasnya di dalam kehidupan politik. Jika dilihat dari undang-undang yang berlaku (undang-undang pemilu; nomor 3 tahun 1999 pasal

---

[27] Adnan Topan Husodo, *Mengantisipasi Maraknya Korupsi Pemilu*, (Koran Tempo, 02 April 2009) Diakses pada tanggal 13 Januari 2014 pukul 08.00 WIB http://antikorupsi.org/id/content/mengantisipasi-maraknya-korupsi-pemilu

[28] *Panwaslu Sumut Pidanakan Kasus Money Politics*. Diakses pada tanggal 11 Januari 2014 pukul 19.00 WIB: http://www.medanbagus.com/news.php?id=7303

73 ayat 3, nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117 ayat 2, dan No. 10 Tahun 2008 Pasal 84 ayat 10), politik uang adalah sebuah pelanggaran pemilu, karena tidak dibenarkan untuk "membeli" suara konstituen. Namun di sisi lain baik pihak politisi maupun rakyat mempunyai peran, fungsi, dan kepentingan masing-masing dalam struktur politik demokrasi. Suara rakyat merupakan komoditas bagi modal politisi, dan rakyat mendapatkan "imbalan" berupa uang maupun benda bernilai materi lainnya.

Adanya politik uang di ranah pemilihan umum kepala daerah dilihat dari sudut pandang elit politik merupakan salah satu strategi yang dirasa dapat meningkatkan perolehan suara terhadap calon pasangan kandidat. Namun di level masyarakat, politik uang cenderung mendapatkan perilaku pembiaran atau malah terkesan mendapat sambutan dari massa pemilih. Sulitnya penindakan terhadap pelaku politik uang diantaranya karena masyarakat terkesan tutup mulut atau malah menyambut hangat adanya politik uang sehingga pola peraihan suara seperti ini hampir selalu ada di setiap pemilukada. Bahkan masyarakat seolah-olah telah memaklumi dan melegitimasi adanya politik uang dalam ajang pilkada[29].

[29] Agus Herta Sumarto, *Politik Uang Mengkhawatirkan* (Jakarta: Koran Jakarta 11 Agustus 2010) hal 3.

Bagan Kerangka Pemikiran I.1.

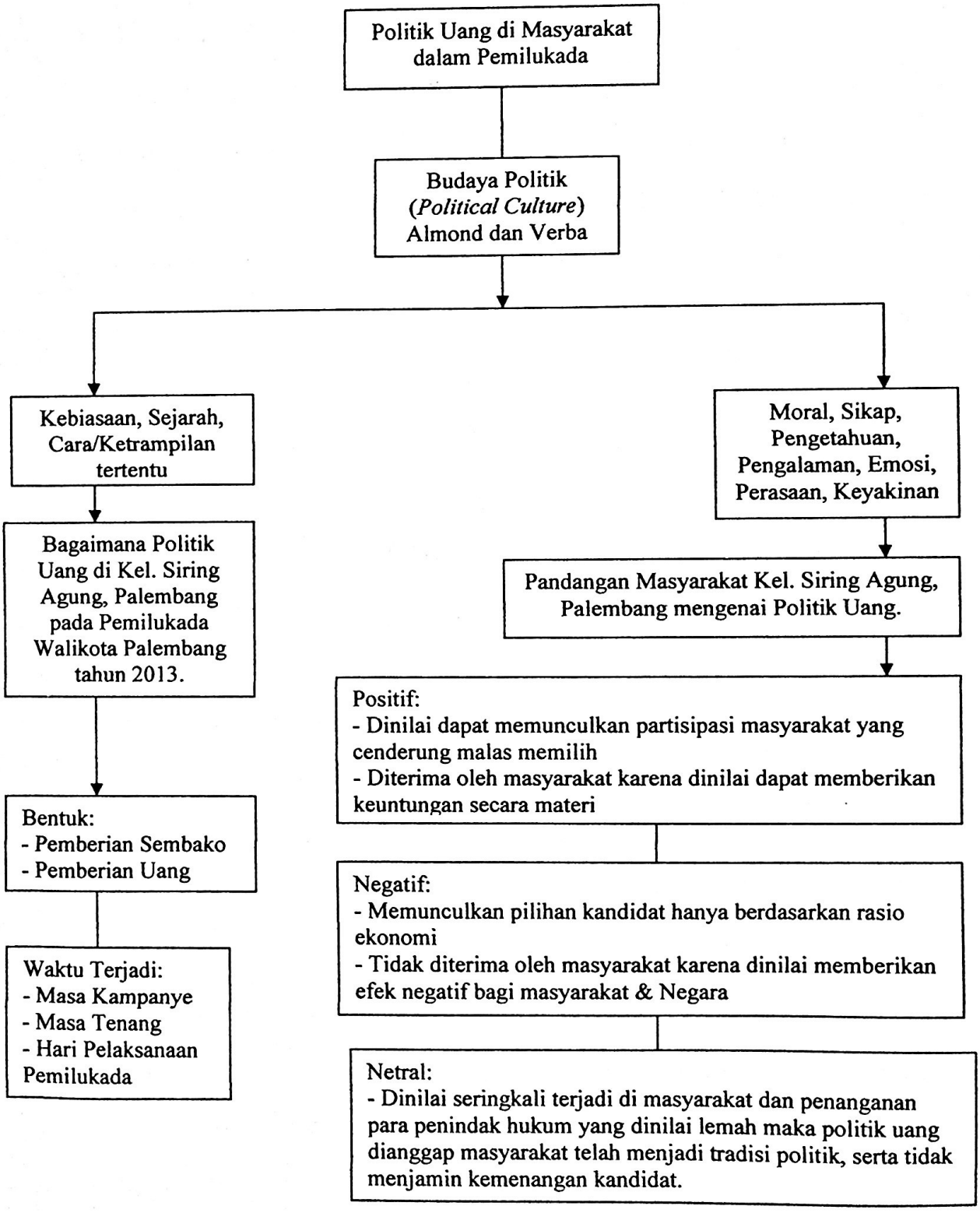

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dalam masyarakat. Oleh karena itu dengan penelitian ini peneliti mencoba untuk memberikan gambaran tentang politik uang dalam pemilihan kepala daerah Walikota Palembang tahun 2013 (studi pada masyarakat Kelurahan Siring Agung, Kota Palembang).

1.6.2. Batasan Konsep

1. Politik uang adalah sebuah kondisi dimana terdapat pemberian sesuatu baik berupa sembako, uang, maupun jasa dari kandidat secara langsung maupun melalui tim relawan atau tim sukses kandidat kepada konstituen (calon pemilih) di masa pemilihan umum.
2. Pemilihan umum kepala daerah adalah momentum pergantian kepemimpinan suatu daerah yang dilangsungkan secara berkala setiap 5 tahun sekali.

1.6.3. Informan

Subjek dan informan dalam penelitian ini dimaksud adalah informan peneliti yang berfungsi untuk menjaring sebanyak-banyaknya data dan informasi yang akan berguna bagi pembentukan konsep dan reposisi sebagai temuan peneliti (Bungin, 2003: 206).

Proses penentuan informan akan dilakukan dengan cara *purposive snowball.* Prinsip *snowball* maksudnya peneliti mengambil subjek penelitian selanjutnya didasarkan pada petunjuk dari individu sebagai informan pertama tadi diminta untuk menunjuk lagi orang yang sekiranya dapat diwawancarai untuk menggali informasi yang akurat dan disertai dengan beberapa syarat tertentu atau disengaja (*purposive*). Persyaratan dalam memilih dan menentukan informan dalam penelitian ini yaitu :

- Informan adalah individu yang secara kependudukan berdomisili di Kelurahan Siring Agung, Kota Palembang.
- Informan adalah individu yang sudah memiliki hak pilih dan atau sudah pernah menikah.

Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah untuk membantu agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang dapat di jangkau serta untuk menghindari terjadinya pengulangan informasi dan data.

1.6.4. Peran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti diharuskan mendapat hasil interpretatif dari para informan. Perlu adanya keterlibatan antara informan dan peneliti di dalamnya yang dilakukan dengan berbagai metode penelitian. Dari keterlibatan inilah nantinya memunculkan serangkaian fakta-fakta, etis, dan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai peneliti secara penuh *(full observer)*[30] atau lebih dikenal dengan *observer as non participant,* dimana dalam peran ini peneliti tidak berpartisipasi secara langsung di masyarakat mengenai politik uang di Kelurahan Siring Agung dan dalam pemilihan kepala daerah Walikota Palembang tahun 2013.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Siring Agung, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pemilihan ini dilakukan secara *purposive* (sengaja) dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Adanya temuan panitia pengawas pemilu Kota Palembang, bahwa di Kelurahan Siring Agung pada pemilukada walikota palembang tahun 2013, terdapat dugaan politik uang.
2. Berdasarkan pengamatan peneliti selama proses penelitian ini dilakukan, belum adanya penelitian mengenai penelitian sejenis yang dilakukan di Kelurahan Siring Agung pada pemilukada walikota palembang tahun 2013.

1.6.6. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu individu masyarakat Kelurahan Siring Agung, Kota Palembang.

---

[30] Rudito, Famiola Melia, *Social Mapping Metode Pemeta ın Sosial Edisi Revisi,* (Bandung: Rekayasa Sains, 2013) hal. 94

1.6.7. Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[31] Dari pengertian ini, maka jenis data dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama atau data pokok berupa hasil yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Data tersebut berupa hasil wawancara mendalam peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang atau pendukung data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber-sumber data sekunder di peroleh dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah (skripsi yang tidak di publikasikan), serta data-data dari pemerintah kelurahan Siring Agung yang ada hubungannya dengan penelitian ini sehingga dapat memberikan pemahaman tentang subjek penelitian.

1.6.8. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan data sebagai berikut:

---

[31] Jhon Lofland dan H.Lonfland Lyn. *Analyzing Social Setting, a guide to qualitative observation and analysis.* Dalam Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* edisi revisi, 2002, hal.157.

1.6.9. Teknik Analisa Data

Analisis adalah proses menghubung-hubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai akhir pembahasan.

Adapun data penelitian yang akan digunakan adalah dengan menggunakan data kualitatif yaitu data yang berupa wawancara, yang sudah direkam dan dituliskan dalam catatan dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sumber lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan tahap-tahap berikut ini :

1. Reduksi Data

Pada tahap pertama peneliti bisa mendapatkan banyak data baik dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang terekam masih berupa data lapangan, yang masih perlu untuk dirangkum, diikhtisarkan atau diseleksi, masing-masing dimasukkan ke dalam kategori tema yang sama, fokus yang sama atau permasalahan yang sama.

2. Penyajian Data *(Display Data)*

Satuan tumpukan data yang disusun atas dasar pikiran intuisi, pendapat atau kriteria tertentu. Informasi-informasi tadi akan dikategorikan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Penyajian data berfungsi sebagai daftar yang bisa secara ringkas dan cepat menunjukkan cakupan data yang telah dikumpulkan.

3. Penafsiran Data

Proses ini menggunakan metode deskriptif semata-mata, yang menggambarkan dan menceritakan penelitian yang sesuai dengan permasalahan

yang ada di atas. Proses ini juga menyesuaikan dengan hasil wawancara terhadap informan sebelumnya.

1.6.10. Triangulasi Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data yang dapatkan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode, dimana triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data yang berbeda. Untuk memperoleh keakuratan dan keabsahan data mengenai informasi penelitian, peneliti menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut[33]. Melalui berbagai perspektif ini diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran

[33] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007) hal. 330

Shalihin, Nurus, 2013. *Rasionalisasi Agama dalam Arena Politik.* Lubuk Lintah: Imam Bonjol Press

Siswanto, Joko, 2006. *Reaksi Intelektualitas untuk Demokrasi.* Palembang: Yayasan Bakti Nusantara, Pusat Kajian Kebijakan dan Pendidikan Politik.

Soekanto, Soerjono, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Rajawali Pers

Topatimasang, roem, 2011. *Maarif, for culture and humanity.* Jakarta : MAARIF insititute

Upe, Ambo. *Sosiologi Politik Kontemporer.* Makassar : Universitas Hasanudin.2008

Verba, Sidney dan Almond, Gabriel. 1990. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara.* Jakarta: Bumi Aksara

Wibisono, D. Anton. *Senyum Satria Piningit.* Yogyakarta: Ircisod. 2012

Sumber-Sumber Lainnya

Artikel dan Internet :

Eko, Sutoro. 2003. *Modal Sosial, Desentralisasi dan Demokrasi Lokal.* Salatiga. http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2342410-politik-uang/#ixzz2GscBPFZm Diakses pada hari minggu, 17 maret 2013 pukul 09.00 WIB.

http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/04/02/6/143328/Kampanye-Pemilu-Kada-Kota-Palembang-Sarat-Pelanggaran Diakses pada tanggal 2 september 2013 pukul 09.30 WIB

http://penaone.com/panwaslu-palembang-temukan-pelanggaran-kampanye-pilkada.html Diakses pada tanggal 15 Juli 2013 pukul 19.00 WIB.

http://news.liputan6.com/read/636755/alex-noerdin-pakai-apbd-untuk-kampanye-mk-sumsel-pilkada-ulang Diakses pada tanggal 15 Juli 2013 pukul 19.00 WIB.

http://sumsel.tribunnews.com/2013/04/11/panwaslu-catat-16-pelanggaran-pilkada-palembang Diakses pada tanggal 15 Juli 2013 pukul 19.00 WIB.

http://kadermudabanten.blogspot.com/2009/12/pilkada-antara-money-politik-dan-ongkos.html Diakses pada tanggal 18 agustus 2013 pukul 11.30 WIB

http://ugm.ac.id/id/berita/8264-politik.uang.masih.warnai.pemilu.di.asia.tenggara Mada Sukmajati 2013 Diakses pada tanggal 09 oktober 2013 pukul 11.00 WIB

http://antikorupsi.org/id/content/mengantisipasi-maraknya-korupsi-pemilu Adnan Topan Husodo, *Mengantisipasi Maraknya Korupsi Pemilu*, (Koran Tempo, 02 April 2009) Diakses pada tanggal 13 Januari 2014 Pukul 08.00 WIB

http://www.medanbagus.com/news.php?id=7303 Panwaslu Sumut Pidanakan Kasus Money Politics. Diakses pada tanggal 11 Januari 2014 pukul 19.00 WIB

http://hukum.kompasiana.com/2013/12/20/hingga-juli-2013-298-dari-total-524-kepala-daerah-di-indonesia-tersangkut-korupsi-621191.html 298 dari 524 kepala daerah di Indonesia tersangkut korupsi. Diakses pada tanggal 11 Januari 2014 pukul 19.30 WIB

Media Cetak :

Koran Jakarta Edisi 11 Agustus 2010

Kompas, Edisi 16 Maret 2009.